



VAKSINASI COVID-19 DI MYANMAR

IDN/ANTARA

Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengunjungi rumah sakit sementara petugas medis menerima vaksin virus korona (COVID-19) buatan AstraZeneca COVISHIELD setelah negara tersebut menerima 1,5 juta dosis vaksin yang diproduksi oleh Institut Serum India, di Naypyitaw, Myanmar, Rabu (27/1).

## Inggris Ancam Bekukan Aset Rusia

Inggris juga mempertahankan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia atas penahanan tokoh oposisi Alexei Navalny di bawah tinjauan terus menerus.

**LONDON(IM)** - Otoritas Inggris akan membekukan aset Rusia mana pun jika mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa aset semacam itu dapat digunakan untuk mengancam nyawa atau properti warga Inggris. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Inggris Wendy Morton.

Lebih lanjut, Morton mengatakan, London mempertahankan sanksi lebih lanjut terhadap Moskow atas pena-

han tokoh oposisi Alexei Navalny di bawah tinjauan terus-menerus, tetapi menolak untuk menjelaskan secara rinci. "Namun itu tidak akan tepat untuk berkomentar pada tahap ini tentang kemungkinan penunjukan di masa depan karena ini dapat merusak dampaknya," Morton menambahkan seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/1).

Morton membuat pernyataan saat dia mengunjungi klaim sebelumnya oleh

otoritas Inggris atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan umum 2019 di Inggris. Meskipun tidak jelas bagaimana campur tangan itu dilakukan, London sejauh ini gagal menunjukkan bukti.

Terkait dengan ancaman terhadap nyawa atau properti warga Inggris, di masa lalu Inggris mengambil tindakan terhadap Rusia atas tuduhan lain yang tidak berdasar. London menuduh Kremlin mendalangi perancangan mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury pada Maret 2018. Pada saat itu, London mengklaim bahwa Moskow diduga telah membahayakan nyawa warganya dengan tindakan yang dituduhkannya tersebut.

Kremlin dengan keras membantah tuduhan Inggris,

menunjukkan bahwa London "menunjuk" para pelaku perancuan Skripal bahkan sebelum penyelidikan atas masalah tersebut dimulai. Moskow berulang kali menuntut akses ke file kasus, serta akses diplomatik ke mantan warga negaranya. Namun, kedua permintaan tersebut ditolak dalam banyak kesempatan.

Rusia juga mengancam kepulauan Inggris dan sekutu Eropa yang menampar Moskow dengan sanksi, sementara mengusir puluhan diplomat karena tuduhan yang tidak berdasar.

Wakil menteri luar negeri Inggris itu juga menyatakan keprihatinannya atas kelanjutan pembangunan pipa Nord Stream 2, yang menunjukkan bahwa hal itu mungkin merupakan proyek komersial, bukan politik. **tom**

gan yang menguntungkan Ukraina dari transit gas Rusia.

Pernyataannya muncul lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meyakinkan mitra Eropa pada proyek pipa transnasional bahwa sistem transit gas Ukraina akan digunakan selama penggunaannya tetap layak secara ekonomi.

Pipa Nord Stream 2 saat ini telah selesai lebih dari 90%, tetapi baru-baru ini menghadapi tantangan kuat dari Amerika Serikat (AS), yang seperti Inggris, mengklaim proyek energi tersebut merupakan ancaman bagi keamanan energi Eropa. Beberapa negara Uni Eropa penerima pipa gas membantah keras tuduhan tersebut, menekankan bahwa pipa tersebut benar-benar merupakan proyek komersial, bukan politik. **tom**

## AS-Korsel Sepakat Denuklirisasi Korut Adalah Masalah Mendesak

**SEOUL(IM)** - Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha telah melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri baru Amerika Serikat (AS), Antony Blinken. Isu mengenai Korea

Utara (Korut) menjadi salah satu pembahasan utama keduanya.

Menurut Kementerian Luar Negeri Korsel, Kang dan Blinken, mereka setuju bahwa denuklirisasi Korut adalah masalah mendesak yang membutuhkan kerja sama erat mereka.

"Kedua menteri berbagi pema-

haman bahwa masalah nuklir Korut perlu segera ditangani di bawah pemerintahan (Presiden AS Joe) Biden dan setuju untuk mempertahankan konsultasi erat untuk menyelesaikan masalah," kata Kementerian Luar Negeri Korsel.

"Kang dan Blinken juga sepakat untuk memperluas

hubungan Korea Selatan-AS melalui kerja sama seputar masalah signifikansi global, seperti perubahan iklim dan Covid-19," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/1).

Kang, menurut Kementerian Luar Negeri Korsel, juga mengucapkan selamat atas persetu-

juan Senat AS, yang membuat Blinken telah resmi menjadi Menteri Luar Negeri AS.

Seperti diketahui, Blinken menjadi Menteri Luar Negeri AS setelah mendapatkan suara 78 setuju, dibandingkan 22 yang menolaknya di Senat AS. **ans**

## Biden Bekukan Penjualan Senjata ke Arab Saudi dan UEA

**WASHINGTON(IM)** - Pemerintahan Joe Biden telah membekukan sementara penjualan senjata yang tertunda ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) saat meninjau kesepakatan senjata era Trump. Demikian laporan Wall Street Journal (WSJ).

Pejabat AS mengatakan kepada WSJ bahwa pemerintahan Biden menghentikan sementara implementasi kesepakatan baru-baru ini yang diumumkan oleh pemerintahan Trump, termasuk penjualan amunisi ke Arab Saudi dan jet tempur F-35 ke UEA.

Rencana Washington untuk menjual jet tempur siluman canggih ke Abu Dhabi pertama kali muncul pada Agustus lalu, beberapa hari setelah UEA setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam pembicaraan yang ditengahi Gedung Putih.

Sampai saat itu, AS tidak mengizinkan negara mana pun di Timur Tengah untuk membeli F-35, kecuali Israel, karena khawatir peralatan militer tersebut akan merusak keunggulan militer kualitatif Israel atau QME.

QME adalah persyaratan hukum bagi AS untuk memastikan Israel mempertahankan superioritas militer di wilayah tersebut.

Pembekuan penjualan amunisi ke kerajaan di Timur Tengah kemungkinan menunjuk pada penjualan 7.500 peluru kendali presisi yang diumumkan oleh pemerintahan Trump bulan lalu.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menggambarkan tindakan tersebut, yang diambil sehari setelah Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dilantik, adalah untuk sementara waktu menghentikan implementasi beberapa transfer dan penjualan pertahanan AS yang tertunda di bawah Penjualan Militer Asing dan Penjualan Komersial Langsung untuk memungkinkan kepemimpinan yang baru mendapat kesempatan untuk meninjau keputusan.

"Ini adalah tindakan administratif rutin yang khas untuk hampir semua transisi, dan menunjukkan komitmen Administrasi untuk transparansi dan tata kelola yang baik, serta memastikan penjualan senjata AS memenuhi tujuan strategis kami untuk membangun

mitra keamanan yang lebih kuat, dapat dioperasikan, dan lebih mampu," kata juru bicara itu seperti dikutip dari Middle East Eye, Kamis (28/1).

Tidak jelas berapa lama pembekuan tersebut akan diberlakukan. Namun, meskipun ada pembekuan, pejabat AS mengatakan kepada WSJ bahwa peninjauan penjualan itu tidak biasa, dan meskipun ada jeda, banyak transaksi kemungkinan akan dilanjutkan.

Saat kampanye, Biden berjanji untuk mengakhiri dukungan AS untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman, dan memastikan senjata Amerika tidak digunakan untuk memicu konflik.

"Presiden terpilih telah menjelaskan bahwa kami akan mengakhiri dukungan kami untuk kampanye militer yang dipimpin oleh Arab Saudi di Yaman, dan saya pikir kami akan mengerjakannya dalam waktu yang sangat singkat," kata Blinken pekan lalu selama sidang konfirmasi di Senat AS.

Kelompok hak asasi manusia telah mengkritik keras kesepakatan senjata dengan negara-negara Teluk. Mereka mengatakan bahwa senjata-senjata itu digunakan dalam perang di Yaman, negara yang menghadapi apa yang digambarkan oleh PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

CEO Raytheon Greg Hayes mengatakan kepada investor pada hari Selasa bahwa dia mengharapkan Biden untuk memblokir setidaknya satu dari kesepakatan senjata pabrikan senjata baru-baru ini dengan Riyadh. "Kami berasumsi bahwa kami akan mendapatkan lisensi untuk menyediakan sistem senjata ofensif ini kepada pelanggan kami," situs berita Defense One mengutipnya.

Namun, sementara pembekuan mungkin menandakan pergeseran dari pemerintahan Trump, kepala Raytheon mengatakan pada hari Selasa bahwa itu tidak akan berarti mengakhiri semua penjualan senjata ke Timur Tengah. "Perdamaian tidak akan pecah di Timur Tengah dalam waktu dekat," kata Hayes.

"Saya pikir itu tetap menjadi area di mana kami akan terus melihat pertumbuhan yang solid," tukasnya. **gul**

## Perkosa Putri Tiri 105 Kali, Pria Ini Dihukum Penjara 1.050 Tahun

**KLANG(IM)** - Seorang pria di Malaysia dihukum penjara 1.050 tahun dan 24 cambukan karena memerkosa putri tirinya sebanyak 105 kali selama dua tahun. Vonis dijatuhkan hakim Pengadilan Sesi setempat, kemarin.

Hakim Datin M. Kunasundary menjatuhkan hukuman setelah terdakwa mengaku bersalah telah memerkosa anak tirinya yang berusia 12 tahun sebanyak 105 kali selama dua tahun.

Hakim memerintahkan terdakwa untuk menjalani hukuman 10 tahun penjara dan dua cambukan untuk setiap tuduhan pemerkosaan, dengan hukuman yang dijalankan berturut-turut sejak tanggal penangkapannya, 20 Januari.

Dalam membacakan hukuman yang dijatuhkan, Kunasundary mengatakan pelanggaran itu tidak hanya berat, tapi keji dan telah merusak masa depan korban. "Saya harap Anda akan bertobat selama di penjara. Seharusnya Anda tidak melakukan tindak kekerasan dan meski hukumannya minimal, pengadilan merasa sudah cukup dengan

mempertimbangkan jumlah dakwaan terhadap Anda," ujarnya, seperti dikutip dari Bernama, Kamis (28/1).

Pria yang menganggur itu didakwa melakukan incest dengan kmemerkosa putri tirinya di sebuah rumah di Sungai Way, Petaling, Selangor, sejak 5 Januari 2018 hingga 24 Februari 2020. Dakwaan itu didasarkan pada Pasal 376B Undang-Undang Pidana.

Sebelumnya, Wakil Jaksa Penuntut Umum Nurul Qistini Qamarul Abrar mendesak pengadilan menjatuhkan hukuman penjara yang berat dan cambuk maksimal kepada terdakwa dengan mempertimbangkan faktor kepentingan umum. "Korban dalam kasus ini berusia 12 tahun saat pertama kali diperkosa oleh terdakwa, yang kemudian terus memerkosanya sebanyak 105 kali selama dua tahun," katanya.

"Sebagai ayah tiri korban, seharusnya dia bertanggung jawab melindungi korban tapi malah menghancurkan harga dirinya. Tindakannya akan menimbulkan trauma seumur hidup bagi korban," ujarnya.

"Kasus incest adalah pelanggaran yang mengerikan dan terukut serta dipandang serius oleh setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang agama," paparnya.

"Tindakan terdakwa serupa dengan huruan makan anak (ikan gabus yang memakan anaknya sendiri) dan dipandang serius oleh masyarakat umum, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama," imbuh Nurul Qistini.

Terdakwa, yang tak disebutkan namanya, tidak mengajukan banding sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan. Berdasarkan fakta kasus, orangtua kandung korban bercerai pada 2015 dan sang Ibu menikah dengan terdakwa pada November 2016. Selama kejadian, hanya korban dan terdakwa yang berada di dalam rumah dan korban tidak pernah memberitahu siapapun tentang pemerkosaan karena terdakwa mengancam dan memukulinya. Korban baru mengungkap kejadian tersebut setelah ibunya membawanya dan adik perempuannya ke rumah bibi mereka. **tom**



PERSIAPAN PERAYAAN IMLEK DI YU GARDEN - SHANGHAI

IDN/ANTARA

Sejumlah warga bekerja di instalasi sapi yang disiapkan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek di Yu Garden, menyusul wabah penyakit virus korona (COVID-19) di Shanghai, Tiongkok, Rabu (27/1).

## Jepang dan AS

### Perkuat Aliansi Bilateral

**TOKYO(IM)** - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga melakukan panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (28/1). Dalam panggilan telepon tersebut, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang ekonomi dan militer.

Gedung Putih mengatakan Suga dan Biden menegaskan pentingnya penguatan aliansi AS-Jepang sebagai landasan perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kedua belah pihak juga menegaskan kembali bahwa perjanjian keamanan AS-Jepang terhadap pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur yang dikendalikan oleh Jepang dan diklaim Tiongkok.

Pulau tersebut adalah Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Tiongkok. Kedua pemimpin juga menegaskan perlunya denuklirisasi di Semenanjung Korea. "Kami setuju untuk memperkuat

aliansi dengan melakukan lebih banyak panggilan telepon seperti ini," ujar Suga.

Suga mengatakan Gedung Putih akan menjadwalkan kunjungan Presiden Biden ke Jepang secepatnya. Hubungan antara Washington dan dua sekutu utama di Asia Timur telah merenggang di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Setelah dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, Biden berkomitmen untuk membangun kembali hubungan dengan negara-negara sekutu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken langsung melakukan pembicaraan dengan Korea Selatan dan Jepang setelah Senat secara resmi menyetujui Blinken sebagai menteri. Dalam pembicaraan tersebut, Blinken berkomitmen untuk memperkuat aliansi AS dengan kedua negara Asia Timur tersebut. Blinken juga menekankan perlunya kerja sama trilateral yang berkelanjutan. **gul**

## AS Keluarkan Peringatan Terorisme Nasional

**WASHINGTON(IM)** - Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat (AS) mengumumkan peringatan terorisme nasional pada Rabu waktu setempat. Hal itu mengutip potensi ancaman dari ekstremis anti-pemerintah domestik yang menentang Joe Biden sebagai presiden.

"Informasi menunjukkan bahwa beberapa kekerasan ekstremis bermotivasi ideologis dengan keberatan terhadap pelaksanaan otoritas pemerintah dan transisi presiden, serta keluhan yang dirasakan lainnya yang dipicu oleh narasi palsu, dapat terus bergerak untuk menghasut atau melakukan kekerasan," kata departemen itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (28/1).

Buletin Sistem Penasihat Terorisme Nasional mengatakan ancaman serangan yang meningkat akan bertahan dalam beberapa minggu setelah pelantikan presiden yang berlangsung pada 20 Januari berakhir dengan sukses.

"DHS tidak memiliki informasi untuk menunjukkan plot yang spesifik dan kredibel," katanya.

"Namun, kerusuhan dengan kekerasan terus berlanjut dalam beberapa hari ter-

akhir dan kami tetap khawatir bahwa individu yang frustrasi dengan pelaksanaan otoritas pemerintah dan transisi presiden dapat terus memobilisasi berbagai aktor yang bermotivasi ideologis untuk menghasut atau melakukan kekerasan," sambung penguaman itu.

Peringatan itu mengatakan telah ada ancaman yang meningkat sejak tahun lalu dari ekstremis kekerasan domestik yang dimotivasi oleh pembatasan Covid-19, kekalahan Biden atas Donald Trump dalam pemilihan presiden pada November lalu, kebrutalan polisi, dan imigrasi ilegal.

DHS mengatakan motivasi ini dapat tetap ada selama beberapa bulan mendatang dan bahwa serangan 6 Januari lalu oleh pendukung Trump di Kongres dapat membuat para ekstremis menargetkan pejabat terpilih dan fasilitas pemerintah.

Lebih dari 150 orang, termasuk anggota kelompok ekstremis bersenjata, telah ditangkap sejak serangan ke Gedung Capitol, yang diac sebagai pemberontakan.

DHS mendesak masyarakat untuk melaporkan aktivitas kekerasan dan ancaman kekerasan. **ans**



IDN/ANTARA

### LOKASI BENTROKAN POLISI DAN PETANI DI INDIA

Polisi berjalan melewati kendaraan polisi yang rusak di luar Benteng Merah yang bersejarah setelah bentrokan Selasa antara polisi dan petani, di kawasan tua Delhi, India, Rabu (27/1).

## Biden Dukung Solusi Dua Negara, Palestina Semringah

**MOSKOW(IM)** - Palestina memuji posisi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel -Palestina. Hal itu diungkapkan Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz Nofal. "Kami sangat mengapresiasi posisi baru Amerika ini," ujarnya seperti dikutip dari TASS, Kamis (28/1).

Duta besar Palestina tersebut menunjukkan bahwa Palestina telah melalui masa-masa sulit ketika mantan Presiden AS Donald Trump menjabat.

Diplomat itu menambahkan bahwa Penjabat Perwakilan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Richard Mills mengumumkan bahwa misi diplomatik AS di Yerusalem Timur dan misi diplomatik Palestina di Washington, yang ditutup oleh pemerintahan AS terakhir akan dibuka kembali. Kami sangat menghargai posisi ini," Nofal menambahkan.

Pada hari Selasa, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa pandangan Biden adalah solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan dalam menyelesaikan

konflik Israel-Palestina.

Sementara itu Pelaksana Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills meyakinkan Dewan Keamanan PBB bahwa Pemerintahan Joe Biden mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina dan akan membatalkan beberapa keputusan Donald Trump. "Washington akan mendesak Israel dan Palestina untuk menghindari langkah-langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit, seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, pembongkaran, hasutan untuk melakukan kekerasan dan memberikan kompensasi bagi individu yang dipenjara atas tindakan terorisme," kata Mills.

Kami berharap akan mungkin untuk mulai bekerja perlahan-lahan membangun kompetensi di kedua sisi untuk menciptakan lingkungan di mana kita mungkin sekali lagi dapat membantu memajukan solusi," papar Mills kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB.

Palestina menginginkan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya. Semua wilayah itu direbut Israel pada 1967. **gul**